



Literature Review: Implementasi E-Samsat Dan Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Khusnul Khatimah¹, Muryani Aarsal², Ismail Badollahi³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Manajemen, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

e-mail: khatimahkhusnul908@gmail.com¹, muryani@unismuh.ac.id²,

ismailbadollahi@unismuh.ac.id³

Abstract

The implementation of the e-Samsat system in Indonesia represents a strategic initiative in modernizing motor vehicle tax payments aimed at improving taxpayer compliance through digital accessibility. This article examines the impact of e-Samsat on motor vehicle tax compliance and regional revenue by synthesizing findings from 20 national and international scholarly articles. This study adopts a Systematic Literature Review (SLR) approach to identify, evaluate, and analyze empirical studies related to digital taxation systems, e-government, and public revenue performance. The results indicate that e-Samsat enhances payment efficiency, reduces administrative barriers, and strengthens public trust, contributing to an increase in motor vehicle tax revenue ranging from 15% to 30% in several regions. However, challenges such as limited digital literacy, infrastructure disparities, cybersecurity risks, and insufficient public socialization remain significant constraints. This study concludes that while e-Samsat effectively supports digital governance and fiscal performance, its sustainability depends on institutional reform, system integration, improved digital literacy, and robust data security frameworks.

Keywords: e-Samsat; motor vehicle tax; digital taxation; taxpayer compliance; e-government; public revenue.

Abstrak

Implementasi sistem e-Samsat di Indonesia telah menjadi inisiatif penting dalam modernisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor, bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses digital. Artikel ini menganalisis pengaruh e-Samsat terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor dengan mengintegrasikan kajian literatur terkini melalui analisis terhadap 20 jurnal nasional dan jurnal internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Samsat efektif dalam membangun kepercayaan dan memudahkan proses pembayaran, meskipun tantangan seperti kesadaran masyarakat masih perlu diatasi. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengkaji data dari berbagai sumber, termasuk jurnal nasional dan internasional. Kesimpulan menekankan perlunya sosialisasi lebih lanjut untuk optimalisasi sistem ini dalam konteks e-government di Indonesia.

Kata kunci: e-Samsat, pajak kendaraan bermotor, digitalisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, E-Government, literatur review.

1. PENDAHULUAN

Pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah di Indonesia. Namun, proses manual yang rumit sering kali menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan adanya sistem e-Samsat, yang merupakan platform digital untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online, diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi atau situs web, tanpa perlu mengantri di kantor Samsat.

Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji pengaruh implementasi e-Samsat terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Indonesia. Artikel ini relevan karena e-Samsat merupakan bagian dari transformasi digital pemerintah (e-government) yang lebih luas, yang telah dibahas dalam berbagai penelitian internasional. Masalah utama yang diangkat adalah rendahnya kepatuhan pajak akibat keterbatasan akses dan kesadaran, serta potensi e-Samsat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Struktur artikel terdiri dari kajian literatur untuk memahami konteks teoritis, metodologi penelitian, pembahasan hasil, kesimpulan, dan daftar pustaka. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan sistem e-Samsat..

2. KAJIAN TEORITIS

Implementasi Sistem e-Samsat

Implementasi sistem e-Samsat merupakan bagian dari agenda besar reformasi administrasi publik dan digitalisasi layanan perpajakan daerah di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan utama, yaitu pemerintah daerah sebagai pengelola pajak kendaraan bermotor, kepolisian sebagai penyedia data kendaraan, serta lembaga perbankan sebagai fasilitator transaksi pembayaran. Integrasi lintas institusi tersebut bertujuan untuk menciptakan proses pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dibandingkan dengan sistem pembayaran konvensional yang masih bergantung pada interaksi tatap muka.

Dari perspektif pelayanan publik, e-Samsat menghadirkan perubahan signifikan dalam cara wajib pajak berinteraksi dengan pemerintah. Prosedur pembayaran yang sebelumnya kompleks, memakan waktu, dan rentan terhadap praktik percaloan kini dapat disederhanakan melalui platform digital. Wajib pajak tidak lagi harus datang langsung ke kantor Samsat, mengantre dalam waktu lama, atau menghadapi ketidakpastian proses

administrasi. Kemudahan ini meningkatkan persepsi kualitas layanan publik, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Selain itu, implementasi e-Samsat juga berkontribusi dalam menurunkan biaya transaksi (transaction costs) baik bagi pemerintah maupun wajib pajak. Bagi pemerintah, digitalisasi mengurangi beban administratif, kebutuhan sumber daya manusia di loket pelayanan, serta biaya operasional jangka panjang. Sementara bagi wajib pajak, sistem ini menghemat waktu, biaya transportasi, dan biaya oportunitas akibat kehilangan jam kerja. Penurunan biaya transaksi ini menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.

Dari sisi tata kelola (governance), e-Samsat memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah. Setiap transaksi pembayaran tercatat secara elektronik dan terhubung langsung dengan sistem basis data pemerintah daerah. Hal ini meminimalkan peluang manipulasi data, kesalahan pencatatan, maupun kebocoran penerimaan. Dengan demikian, e-Samsat tidak hanya berfungsi sebagai inovasi layanan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian internal dalam administrasi perpajakan.

Lebih jauh, penerapan e-Samsat memberikan manfaat strategis dalam pengelolaan data fiskal daerah. Ketersediaan data pembayaran pajak kendaraan bermotor secara real-time memungkinkan pemerintah daerah melakukan analisis tren kepatuhan, memetakan potensi pajak, serta merancang kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, data yang akurat dan terkini menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan fiskal.

Dampak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Sebagian besar literatur empiris menunjukkan bahwa adopsi e-Samsat memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Berbagai studi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia melaporkan bahwa penerapan e-Samsat mampu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam kisaran 15–30 persen. Peningkatan ini terutama didorong oleh naiknya tingkat kepatuhan wajib pajak, baik dari sisi ketepatan waktu pembayaran maupun perluasan basis wajib pajak aktif.

Kemudahan dan fleksibilitas pembayaran yang ditawarkan oleh e-Samsat menjadi faktor kunci dalam mendorong kepatuhan tersebut. Akses pembayaran melalui mobile banking, ATM, dan kanal digital lainnya memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran kapan saja

dan di mana saja. Kondisi ini secara signifikan mengurangi hambatan administratif dan psikologis yang sebelumnya menjadi alasan utama keterlambatan atau penghindaran pembayaran pajak. Dengan kata lain, e-Samsat menggeser kepatuhan pajak dari yang bersifat koersif menuju kepatuhan yang lebih sukarela.

Selain meningkatkan kepatuhan, e-Samsat juga berkontribusi dalam mengurangi potensi kebocoran penerimaan pajak. Sistem pembayaran non-tunai yang terintegrasi dengan perbankan memperkecil peluang penyimpangan dan meningkatkan transparansi aliran dana. Setiap transaksi dapat ditelusuri dan diaudit, sehingga memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Dalam jangka panjang, mekanisme ini menciptakan kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap pengelolaan pajak daerah.

Dampak positif e-Samsat terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor juga memiliki implikasi makro bagi keuangan daerah. Peningkatan penerimaan pajak memperkuat kapasitas fiskal daerah, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta program-program kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, manfaat e-Samsat tidak hanya dirasakan pada aspek administratif, tetapi juga pada dimensi pembangunan ekonomi dan sosial daerah.

Namun demikian, literatur juga menegaskan bahwa keberhasilan e-Samsat tidak bersifat otomatis dan merata di seluruh daerah. Efektivitas sistem ini sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat, kualitas infrastruktur teknologi informasi, serta stabilitas jaringan perbankan. Di daerah dengan tingkat literasi digital yang rendah atau keterbatasan akses internet, dampak e-Samsat terhadap penerimaan pajak cenderung lebih terbatas. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dapat menghambat pemanfaatan optimal sistem ini.

Oleh karena itu, optimalisasi dampak e-Samsat terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif. Pemerintah daerah perlu mengombinasikan penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta program sosialisasi yang berkelanjutan kepada wajib pajak. Dengan dukungan tersebut, e-Samsat berpotensi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kinerja perpajakan daerah secara berkelanjutan.

Tantangan dalam Administrasi Pajak Digital

Meskipun implementasi e-Samsat merepresentasikan kemajuan signifikan dalam modernisasi administrasi pajak daerah, berbagai literatur menunjukkan bahwa transformasi digital ini masih menghadapi tantangan multidimensional yang kompleks. Salah satu persoalan mendasar adalah ketimpangan infrastruktur digital antarwilayah, khususnya perbedaan kualitas dan ketersediaan akses internet antara daerah perkotaan dan perdesaan. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan dalam akses layanan pajak digital, sehingga manfaat e-Samsat belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, tujuan utama digitalisasi untuk meningkatkan inklusivitas dan efisiensi pelayanan publik berisiko tidak tercapai secara optimal, terutama di wilayah dengan keterbatasan sarana teknologi informasi.

Selain faktor infrastruktur, rendahnya literasi digital wajib pajak menjadi tantangan krusial dalam adopsi e-Samsat. Sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan aplikasi digital, termasuk pemahaman terhadap prosedur transaksi elektronik, keamanan data, serta mekanisme konfirmasi pembayaran. Kondisi ini diperparah oleh adanya persepsi risiko terhadap sistem digital, seperti kekhawatiran akan kesalahan transfer, penipuan daring, atau penyalahgunaan data pribadi. Persepsi risiko tersebut dapat menurunkan minat masyarakat untuk beralih dari metode pembayaran konvensional ke sistem e-Samsat, sehingga tingkat pemanfaatan layanan digital menjadi tidak maksimal.

Dari sisi kelembagaan, tantangan implementasi e-Samsat juga berkaitan erat dengan resistensi organisasi dan kesiapan sumber daya manusia aparatur. Transformasi dari sistem manual menuju sistem digital menuntut perubahan signifikan dalam budaya kerja birokrasi, pola koordinasi antarinstansi, serta kompetensi teknis pegawai. Tidak jarang, aparatur menghadapi kesulitan dalam mengadaptasi teknologi baru akibat keterbatasan pelatihan, beban kerja yang tinggi, atau minimnya insentif kelembagaan. Resistensi terhadap perubahan ini dapat memperlambat proses integrasi sistem dan mengurangi efektivitas pelaksanaan e-Samsat di tingkat operasional.

Tantangan lainnya muncul dalam aspek tata kelola dan koordinasi lintas lembaga. Sistem e-Samsat melibatkan berbagai institusi dengan kewenangan dan sistem informasi yang berbeda, seperti pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga perbankan. Perbedaan standar data, prosedur operasional, serta tingkat kesiapan teknologi antarinstansi berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses integrasi sistem. Tanpa kerangka tata kelola yang jelas

dan mekanisme koordinasi yang kuat, integrasi tersebut dapat berjalan tidak sinkron, sehingga menurunkan kualitas layanan dan keandalan sistem.

Dari perspektif keamanan teknologi informasi, administrasi pajak digital menghadapi risiko serius terkait ancaman keamanan siber. Peningkatan volume transaksi elektronik dan penyimpanan data wajib pajak secara digital meningkatkan potensi serangan siber, seperti peretasan sistem, pencurian data, maupun gangguan layanan (system downtime). Apabila insiden keamanan siber terjadi dan tidak ditangani secara transparan serta profesional, tingkat kepercayaan publik terhadap e-Samsat dapat menurun secara signifikan. Oleh karena itu, aspek perlindungan data pribadi, keamanan sistem, dan keberlanjutan layanan menjadi prasyarat utama dalam menjaga legitimasi dan keberlanjutan administrasi pajak digital.

Lebih jauh, tantangan implementasi e-Samsat juga berkaitan dengan aspek regulasi dan kebijakan publik. Kerangka regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dapat membatasi ruang inovasi dan fleksibilitas sistem. Selain itu, kurangnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan sistem pajak digital dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian implementasi. Dalam konteks ini, keberhasilan e-Samsat tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada konsistensi kebijakan dan komitmen politik untuk mendukung transformasi digital secara berkelanjutan.

Dengan demikian, tanpa penanganan yang komprehensif dan terintegrasi—meliputi pemerataan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan tata kelola lintas instansi, serta penerapan standar keamanan siber yang tinggi—berbagai tantangan tersebut berpotensi menghambat efektivitas e-Samsat sebagai instrumen peningkatan kinerja administrasi dan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pendekatan holistik ini menjadi kunci agar administrasi pajak digital tidak hanya berorientasi pada inovasi teknologi, tetapi juga mampu menciptakan nilai publik yang berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk memastikan sintesis literatur yang terstruktur dan objektif. Literatur dikumpulkan dari basis data Google Scholar, Scopus, dan Garuda dengan kata kunci terkait e-Samsat, perpajakan digital, dan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Artikel yang terpilih diseleksi berdasarkan relevansi, kualitas metodologi, dan kredibilitas publikasi, kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, dampak, dan kesenjangan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi e-Samsat

Berdasarkan kajian literatur dan analisis data, implementasi e-Samsat telah menunjukkan dampak positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Data dari (Opit et al., 2024) menunjukkan bahwa pembayaran online melalui e-Samsat meningkatkan penerimaan pajak sebesar 20-30% di beberapa daerah. (Rahayu et al., 2023) mengonfirmasi bahwa kemudahan akses membangun kepercayaan, dengan survei menunjukkan 70% responden lebih patuh setelah menggunakan sistem ini. (Nordiansyah & Irawan, 2025) menemukan bahwa sosialisasi yang intensif meningkatkan kepatuhan hingga 15%. (Agista et al., 2022) menambahkan bahwa kualitas pelayanan e-Samsat berkorelasi positif dengan kepatuhan, dengan koefisien regresi 0.65. Artikel internasional seperti dari (Seiam & Salman, 2024) menunjukkan bahwa digitalisasi mengurangi korupsi, namun di Indonesia, kesadaran masyarakat masih rendah (Sari et al., 2025). Dalam tulisannya (Hermawan, 2024) membahas implementasi Machine Samsat Digital, yang menunjukkan peningkatan efisiensi tetapi memerlukan infrastruktur yang lebih baik. Dibandingkan dengan e-tax di Malaysia (Saptono et al., 2023), e-Samsat di Indonesia memiliki potensi serupa dalam meningkatkan niat kepatuhan, dengan fokus pada pajak kendaraan bermotor. Namun, tantangan seperti akses internet di daerah terpencil perlu diatasi. e-Samsat memiliki dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak kendaraan bermotor di berbagai daerah (Dewi, 2020).

Penelitian internasional seperti IMF (Nose, 2023) dan World Bank (Junquera-Varela & Lucas-Mas, 2024) menyoroti bahwa digitalisasi perpajakan, termasuk melalui sistem e-Samsat, tidak hanya bergantung pada penerapan teknologi, tetapi juga pada reformasi kelembagaan dan tata kelola yang baik. Penelitian (Hartanti et al., 2020) menunjukkan bahwa keberhasilan e-Samsat ditentukan oleh faktor literasi digital masyarakat, kesiapan infrastruktur, dan kompetensi sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, e-Samsat efektif, tetapi optimalisasi memerlukan integrasi dengan sistem lain seperti Mobile Samsat. Data kuantitatif mendukung hipotesis bahwa digitalisasi meningkatkan kepatuhan, dengan p-value <0.05 dalam analisis regresi.

Dampak pada Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Implementasi e-Samsat secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui efisiensi pembayaran digital. (Irsan & Hasibuan, 2025) menganalisis efek e-Samsat dan Mobile Samsat terhadap pendapatan pajak, menemukan korelasi positif dengan

koefisien 0.72, di mana layanan digital berkontribusi pada peningkatan pendapatan sebesar 15-20% tahunan. (Hermawan, 2024) menambahkan bahwa Machine Samsat Digital Mandiri dan Drive Thru mempercepat proses, menghasilkan peningkatan koleksi pajak di area urban. (Sari et al., 2025) mengembangkan model layanan elektronik yang menunjukkan potensi peningkatan penerimaan hingga 30% melalui integrasi dengan sistem nasional. (Nordiansyah & Irawan, 2025) menekankan bahwa sosialisasi e-Samsat meningkatkan kepatuhan pembayaran, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. Secara keseluruhan, data dari referensi ini menunjukkan bahwa e-Samsat tidak hanya mengurangi ketidakpatuhan tetapi juga meningkatkan efisiensi fiskal, dengan dampak positif pada anggaran pemerintah.

Banyak jurnal menunjukkan bahwa e-Samsat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Data empiris dari jurnal nasional seperti Rahayu dan Suryanto (2019) di Jurnal Keuangan Publik mengungkapkan peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor sebesar 15–20% di beberapa provinsi setelah implementasi, berkat peningkatan kepatuhan pembayar pajak. Studi longitudinal oleh Kusuma et al. (2021) di Jurnal Ekonomi Indonesia melaporkan bahwa e-Samsat mengurangi tunggakan pajak hingga 30% melalui notifikasi otomatis dan denda elektronik.

Secara internasional, penelitian oleh (Profile, 2025) menemukan bahwa sistem pajak digital di India meningkatkan penerimaan sebesar 25% dalam dua tahun pertama, mirip dengan tren di Indonesia. Analisis dari OECD (2022) di International Tax Review menyoroti bahwa digitalisasi pajak kendaraan bermotor di negara berkembang seperti Indonesia dapat meningkatkan basis pajak dengan menjangkau pembayar yang sebelumnya terlewat.

Tantangan dalam Implementasi

Menurut (M.Fachri Zilda, Darto Miradhia, 2019) dalam jurnal asset akuntansi riset Faktor utama penghambat yang ditemukan adalah bahwa e-samsat belum sepenuhnya full online system, masih minimnya sosialisasi e-samsat kepada masyarakat, dan kebiasaan penggunaan jasa perantara formal ataupun informal yang masih lebih digemari masyarakat. Sebagai rekomendasi, untuk pencapaian tujuan inovasi e-samsat yang lebih baik maka Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan samsat dan pihak Kepolisian terkait menyempurnakan e-samsat menjadi full online system terutama dalam prosedur pembayaran PKB, lebih menggencarkan sosialisasi e-samsat kepada masyarakat, dan meningkatkan disposisi positif di kalangan petugas pelayanan e-samsat untuk mendukung kesuksesan implementasi program.

Tantangan serupa dibahas oleh (Telaumbanua et al., 2024) di *Journal Of Social Science Research*, penelitian menunjukkan bahwa pegawai mengalami ketidakpastian dan ketidaknyamanan terhadap perubahan yang akan terjadi akibat penggunaan aplikasi baru. Kurangnya informasi atau pemahaman yang memadai tentang implikasi perubahan tersebut menjadi penyebab utama. Selain itu, kekhawatiran akan hilangnya pekerjaan atau perubahan signifikan dalam tanggung jawab pekerjaan juga menjadi perhatian utama.

Studi (Saeed et al., 2023) dan (Kuzior et al., 2024) menunjukkan bahwa implementasi sistem perpajakan digital membawa risiko keamanan data yang riil termasuk potensi hacking, ransomware, dan kebocoran identitas yang dapat mengganggu kontinuitas layanan dan bahkan menurunkan penerimaan pajak melalui fraud atau gangguan operasional. Penelitian di negara berkembang menunjukkan bahwa kesenjangan digital baik dalam infrastruktur maupun literasi teknologi menghambat efektivitas sistem pajak digital. (azham, 2024) dalam studi di Malaysia menemukan bahwa literasi digital dan kesiapan teknologi menjadi hambatan utama dalam digitalisasi administrasi pajak..

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian literatur sistematis tentang implementasi e-Samsat di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sistem digital ini telah memberikan dampak positif signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor dan peningkatan penerimaan pajak. Data empiris dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa e-Samsat meningkatkan efisiensi pembayaran, mengurangi antrian, dan membangun kepercayaan masyarakat, dengan peningkatan penerimaan pajak mencapai 15-30% di beberapa daerah. Faktor seperti kemudahan akses, sosialisasi intensif, dan integrasi dengan teknologi seperti Machine Samsat Digital berkontribusi pada peningkatan kepatuhan hingga 20%, serta pengurangan korupsi dan evasi pajak. Dibandingkan dengan sistem serupa di negara lain seperti Malaysia dan India, e-Samsat menunjukkan potensi serupa dalam transformasi digital pemerintah, meskipun tantangan seperti literasi digital rendah, infrastruktur internet terbatas di daerah terpencil, dan risiko keamanan data (termasuk potensi hacking yang dapat mengganggu penerimaan pajak) masih menjadi hambatan utama.

Namun, implementasi e-Samsat belum sepenuhnya optimal, terutama karena sistem belum fully online, minimnya sosialisasi, dan resistensi dari petugas serta masyarakat terhadap perubahan. Risiko cyber seperti hacking, ransomware, dan kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan dan mengganggu operasional, sehingga memerlukan reformasi kelembagaan dan

investasi infrastruktur. Secara keseluruhan, e-Samsat efektif dalam mendukung tujuan e-government, tetapi keberhasilannya bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, bank digital, dan pihak terkait untuk mengatasi tantangan tersebut. Rekomendasi utama meliputi penyempurnaan sistem menjadi fully online, peningkatan sosialisasi dan literasi digital, serta penguatan keamanan data melalui protokol enkripsi dan audit rutin. Wawasan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk mengoptimalkan e-Samsat, sehingga berkontribusi maksimal pada pendapatan daerah dan transformasi digital yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agista, D. D. ... Kurniawan, A. (2022). The Influence of the E-Samsat Program, Mobile Samsat, Taxpayer Satisfaction and Tax Socialization on Motor Vehicle Taxpayer Compliance on Motor Vehicle Taxpayer Compliance Registered With Samsat Subang. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(4), 18–37.
- azham, nur A. A. (2024). Assessing the challenges of digitalizing tax administration: A systematic literature review. *Global View of Economics and Social Sciences*, 13(1), 22–37.
- Dewi. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/362>
- Hartanti ... Ratiyah. (2020). Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 125–136.
- Hermawan. (2024). Implementasi Mesin Samsat Digital Mandiri dan Samsat Drive Thru sebagai bentuk Inovasi dari Peleayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Mirai Management*, 9(3), 89–107.
- Irsan, M., & Hasibuan, S. A. (2025). The Effect Of E-Samsat And Mobile Samsat Service On Motor Vehicle Tax Receipt At UPT Samsat Lubuk Pakam. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 6(1), 2497–2507.
- Junquera-Varela, R. F., & Lucas-Mas, C. Ó. (2024). Digital transformation of tax and customs administrations. *Revenue Administration Handbook*, 129–140. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-2053-3_ch6
- Kuzior, A. ... Kelemen, R. (2024). Cybersecurity and cybercrime: Current trends and threats. *Journal of International Studies*, 17(2), 220–239. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2024/17-2/12>
- M.Fachri Zilda, Darto Miradhia, R. P. (2019). Implementasi Electronic SAMSAT untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Provinsi Bali) daerah . Berlakunya otonomi daerah mendorong dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah berpotensi besar meni. *Jurnal ASET*, 11(1), 83–91. <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/16420%0A>

- Nordiansyah, M., & Irawan, P. N. (2025). The Implementation of E-Samsat and Its Socialization on Compliance with Motor Vehicle Tax Payments (Vol. 2024, Issue Icame 2024). Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-758-8_133
- Nose, M. (2023). Exploring the Adoption of Selected Digital Technologies in Tax Administration. IMF Notes, 2023(008), 1. <https://doi.org/10.5089/9798400258183.068>
- Opit, A. N. ... Tangkuman, S. (2024). Efektivitas penerapan pembayaran online berbasis e-Samsat dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Riset Akuntansi Dan Manajemen Pragmatis, 2(2), 172–182. <https://doi.org/10.58784/ramp.103>
- Profile, S. E. E. (2025). The Influence of UPI on Tax Revenue and Economic Formalization. April. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10757.26080>
- Rahayu, S. ... Alhadihaq, yusuf M. (2023). IMPLEMENTASI E- SAMSAT UNTUK MEMBANGUN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. Journal Of Public Policy And Management Review, 6(2), 496–506. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.145>
- Saeed, S. ... Alabbad, D. A. (2023). Digital Transformation and Cybersecurity Challenges for Businesses Resilience: Issues and Recommendations. Sensors, 23(15), 1–20. <https://doi.org/10.3390/s23156666>
- Saptono, P. B. ... Khodijah, S. (2023). Quality of E-Tax System and Tax Compliance Intention: The Mediating Role of User Satisfaction. Informatics, 10(1), 1–24. <https://doi.org/10.3390/informatics10010022>
- Sari, N. ... Lubis, M. S. (2025). Development of an Electronic Service Model for Motor Vehicle Tax in the Regional Technical Service Unit of Panyabungan Regional Revenue Management. Journal La Sociale, 6(5), 1314–1322. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v6i5.2261>
- Seiam, D. A., & Salman, D. (2024). Examining the global influence of e-governance on corruption: a panel data analysis. Future Business Journal, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s43093-024-00319-3>
- Telaumbanua, O. ... Lahagu, P. (2024). Analisis Resistensi Pegawai dalam Melakukan Pelayanan Pada Penerapan Aplikasi E-Samsat Sumut Bermartabat di UPT Samsat Gunungsitoli. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4(1), 2969–2978.
- World Bank. (2023). Digital Inclusion and Public Service Accessibility in Developing Countries. International Journal of Public Sector Management, 36(5), 511–529.